

LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN IMPROVING ATHLETES' ACHIEVEMENTS

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PRESTASI ATLET KARO

Ekarina Kamanita Br Meliala¹, Sabaruddin Yunis Bangun², Hariadi³

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
Ekarinakamanita@gmail.com, unisbgn@unimed.ac.id, hariadi@unimed.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to look into how local government initiatives might help Karo athletes improve their performance. The descriptive qualitative data analysis technique was applied in this investigation. Observation and interviews were utilized to obtain data in this study. According to the findings of this study, the Regional Government Policy in Efforts to Improve the Achievement of Karo Athletes is not ideal since various factors such as infrastructure and finance remain. It did not, however, diminish the determination of Karo athletes to attain their goals.

Keywords: *Policy, Local Government, Achievement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan prestasi atlet Karo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlet Karo belum dapat dikatakan maksimal karena masih terkendala beberapa hal seperti sarana prasarana dan pendanaan. Walaupun demikian tidak menyurutkan tekad dari atlet Karo dalam meraih prestasi.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pemerintah Daerah, Prestasi*

Pendahuluan

Dalam perspektif sejarah, terutama di Indonesia, olahraga berkembang melalui proses bertahap dari mulai perkembangan pada jaman penjajahan Belanda, selanjutnya Inggris dan masa pendudukan Jepang. Olahraga adalah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat (Tampubolon & Harianja, 2020). Berolahraga merupakan hak asasi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin (Nababan et al., 2018). Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian atau disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat meningkatkan rasa kebanggaan nasional.

Olahraga sekarang ini sudah menjadi alat kebijakan untuk membangun social capital (institusi, hubungan, dan nilai yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial di masyarakat), menjembatani perbedaan sosial, serta melawan gaya hidup tidak sehat dan isolasi sosial. Dalam konsep pelayanan publik, kehadiran negara/pemerintah sangat penting untuk memberikan peluang kepada setiap orang secara inklusif agar mendapatkan akses dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang olahraga. Campur tangan pemerintah dalam olahraga pada umumnya merupakan sebuah reaksi terhadap masalah khusus seperti standar kesehatan yang buruk di daerah perkotaan, kepentingan militer atau untuk menanggulangi masalah social sehingga olahraga (termasuk rekreasi) diakui sebagai sebuah bidang kebijakan yang khas dan berbeda dengan bidang lainnya. Selanjutnya keterlibatan pemerintah semakin mendalam terhadap olahraga untuk tujuan yang lebih besar dalam konteks pembangunan nasional. Dalam UU SKN menamanatkan bahwa pihak pemerintah berkepentingan untuk memfasilitasi perkembangan pembangunan keolahragaan nasional karena erat hubungannya dengan kebijakan lainnya yang amat strategis bagi kemajuan bangsa, meliputi: integrasi social: kesatuan dan persatuan bangsa; pendidikan: transformasi nilai-nilai pendidikan, termasuk pendidikan watak; kesehatan: upaya pencegahan dan dampak ekonomi, penghematan biaya perawatan kesehatan; pembinaan pemuda: transformasi kecakapan hidup dalam makna luas; pembinaan waktu senggang: pengisian waktu senggang dengan aktivitas yang konstruktif, yang direstui oleh norma dan nilai dalam masyarakat; ekonomi; potensi ekonomi dalam pengembangan industry olahraga yang membangkitkan nilai tambah dalam semua kegiatan olahraga; politik: transformasi nilai demokrasi; dan lingkungan hidup: kesadaran dan tindakan nyata untuk pelestarian lingkungan.

Konsep Dasar Kebijakan dan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuanyang ditempuh oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam menangani masalah atau persoalan yang menjadi kepedulian. Mac Rae dan Wilde menjelaskan bahwa sebuah pilihan

terhadap suatu kegiatan yang berpengaruh secara nyata terhadap sejumlah besar orang disebut kebijakan. (Mutohir, 2003).

Tujuan utama suatu kebijakan adalah untuk memberikan tuntunan bagi tindakan yang dianggap tepat. Dalam masyarakat yang kompleks, kebijakan dikembangkan untuk mencegah kekalutan dan kesemerawutan dan memberikan jaminan untuk memenuhi aneka kepentingan warga masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan yang pas dan tepat, itu berarti bahwa konflik kepentingan dapat dikurangi, jika bukan sampai bisa dihilangkan. Sebuah kebijakan melibatkan sebuah aturan, atau seperangkat tindakan yang nyata menyusul berbagai kasus. Jika sebuah kebijakan hanya berupa pernyataan, maka pernyataan itu berindikasi hanya ungkapan verbal belaka dalam rangka mengarahkan suatu tindakan. Kendati pernyataan itu dapat berpengaruh, pernyataan itu tak dapat dianalisis secara cermat. Analisis kebijakan bertujuan untuk menemukan apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apa perubahan yang diakibatkannya. Dengan kata lain, kita dapat memisahkan antara apa yang pemerintah lakukan dan apa yang diinginkannya. Analisis kebijakan kurang tertarik pada aspek apa yang diucapkan pemerintah atau pernyataan yang bersifat retorik belaka. Hal semacam ini amat sering kita jumpai di Indonesia. Seorang pejabat pemerintah mengemukakan sesuatu pernyataan yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda pula. Contoh semacam ini bagus untuk diangkat bahwa pernyataan semacam itu bukanlah suatu kebijakan.

Analisis kebijakan dapat juga disebut sebagai sebuah bentuk penelitian terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemasyarakatan (termasuk bidang pendidikan jasmani dan olahraga) dan untuk memperoleh pemecahannya. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami masalah yang dihadapi masyarakat, analisis kebijakan mencoba untuk mengkaji tindakan-tindakan yang paling fisibel, menghimpun informasi dan bukti-bukti tentang kemaslahatan dan akibat lainnya yang dibangkitkan oleh penerimaan dan penerapan kebijakan. Kesemua itu dengan maksud untuk membantu para pembuat kebijakan untuk memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Patton dan Sawicki mengemukakan ada dua tipe analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan secara deskriptif, dan analisis kebijakan prospektif. Tipe pertama di-artikan sebagai analisis kebijakan masa lalu dan sekarang, kebijakan yang baru tatkala diterapkan. Tipe kedua terdiri atas analisis yang bersifat peramalan dan preskriptif. Dasar analisis kebijakan dimulai dari menelaah kembali kejelasan masalah secara detail, menetapkan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternative kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, memaparkan dan memilih di antara alternative kebijakan, dan memantau hasil kebijakan.

Pembuat kebijakan adalah pengguna hasil penelitian, sehingga ia memerlukan kejelasan dan ketepatan istilah yang digunakan. Itulah sebabnya, persoalan pokok ialah bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan ilmuwan dengan menterjemahkan masalah kemasyarakatan yang nyata ke dalam dunia teori ilmiah, dan kemudian, hasil penelitian perlu diterjemahkan kembali ke dalam dunia nyata dan kebijakan. Boleh jadi, di sinilah persoalan yang terjadi dalam dunia olahraga di Indonesia. Selain memang masih terbatas kajian yang bersifat makro yang dapat menjawab masalah kemasyarakatan dalam olahraga, komunikasi timbal balik ini tampaknya memang masih lemah dan bahkan ada kesan antara kedua pihak kurang saling memahami sehingga keadaan demikian perlu ditingkatkan. Berbagai konsep yang ditawarkan para peneliti atau mereka yang mengaku pakar olahraga, masih sukar ditangkap para pembuat kebijakan di bidang olahraga.

Pembentukan kebijakan melalui serangkaian proses, yang berawal dari identifikasi masalah nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Masalah ialah suatu keadaan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sekelompok orang atau masyarakat luas dan karena itu perlu dicari cara untuk mengatasinya. Masalah public adalah masalah yang menimbulkan dampak luas, termasuk akibatnya terhadap orang yang tidak terlibat langsung. Masalah yang dirasakan orang ada kaitannya dengan nilai dan harapannya, sementara sumber masalah adalah perubahan sosial, yakni perubahan hidup secara bertahap, seperti perubahan ekonomi dan kependudukan, perubahan teknologi, dan aneka perubahan lainnya yang terjadi dalam kaitannya dengan hubungan antara kelompok-kelompok.

Pembentukan kebijakan melalui sebuah proses, berawal dari kesadaran terhadap sebuah masalah dan melibatkan pengembangan seperangkat kegiatan yang tujuannya dapat diterima, meskipun tak berarti bahwa masalah itu kemudian menghasilkan sebuah peraturan atau perundang-undangan. Meskipun sebuah masalah publik berhasil menjadi sebuah agenda, tidak selalu kemudian pemerintah mengembangkan program dan kegiatannya. Karena itu, seperti halnya kegiatan olahraga, meskipun ada keinginan untuk mengangkatnya sebagai sebuah agenda nasional, tidak selalu kemudian disusul dengan program konkret. Dalam proses pembentukan kebijakan itu, beberapa faktor yang mungkin terlibat yaitu (1) pejabat pemerintah atau suatu lembaga, (2) sekelompok pemerhati, termasuk organisasi swadaya masyarakat, dan (3) kelompok-kelompok berkepentingan. Sebagai sebuah proses, maka pembentukan kebijakan mencakup dua macam kegiatan yaitu (1) pemilihan apa yang perlu dikerjakan, dan (2) penyusunan buram segi hukum. Langkah yang paling menentukan ialah pembualan keputusan yang mencakup kriteria keputusan. Ada beberapa kriteria yang bisa mempengaruhi pilihan kebijakan, meliputi: (1) nilai, (2) afiliasi politik, (3) kepentingan, (4) opini publik, (5) perbedaan, dan (6) aturan pembuatan keputusan.

Anderson (1979) menyebutkan beberapa pelaku yang terlibat dalam penerapan kebijakan, yaitu pihak legislative, pengadilan, kelompok penekan, dan organisasi masyarakat. Ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan, maka tujuan akhir adalah mengontrol perilaku orang banyak, atau “memaksa” orang untuk berbuat sesuai dengan kebijakan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi dipatuhinya suatu kebijakan, pertama, rasa hormat terhadap penguasa di dalam sebuah masyarakat, termasuk otoritas seperti yang diperagakan dalam keputusan lembaga-lembaga pemerintah. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan juga dapat bersumber pada kesadaran dan alasan-alasan logis untuk menerimanya. Misalnya, kebijakan dalam pengembangan olahraga masyarakat yang meskipun tidak banyak dituntun oleh lembaga- lembaga pemerintah, dalam kenyataannya sudah berjalan sendiri berdasarkan usaha swadaya dan swakelola masyarakat. Ketiga, kaitan antara seseorang dengan anggota kelompok lainnya bias juga mempengaruhi prelakunya untuk tidak mematuhi kebijakan. Ikatan perilaku dalam kelompok, sering begitu kuat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal penerapan kebijakan di bidang olahraga, lembaga pemerintah di Indonesia sudah terbiasa menerapkan pendekatan pendidikan dan persuasi. Penyebarluasan metode baru yang lebih berhasil di lingkungan organisasi induk olahraga prestasi misalnya, dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan persuasi untuk meyakinkan para pembina atau pelatih guna mengubah cara-cara tradisional untuk meningkatkan prestasi. Tujuan utama kegiatan itu adalah untuk memupuk pemahaman dan kesiapan menerima inovasi. Namun demikian, tahanan dan penolakannya juga tidak sedikit, suatu hal yang lumrah kita jumpai dalam aneka pembaharuan, seperti dalam bidang lainnya.

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah Daerah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri.

Implementasi Kebijakan

Menurut Walsen Duli, kebijakan pemerintah yang telah disahkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplimentasikan. Implementasi kebijakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik dan tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart, Winarno (Endie Riyoko dkk, 2014:91) menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan (Eko Handoyo, 2012:94) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Keterlibatan Pemerintah Dalam Olahraga

Campur tangan pemerintah dalam olahraga pada umumnya merupakan sebuah reaksi terhadap masalah khusus seperti standar kesehatan yang buruk di daerah perkotaan, kepentingan militer atau untuk menanggulangi masalah sosial sehingga olahraga (termasuk rekreasi) diakui sebagai sebuah bidang kebijakan yang khas dan berbeda dengan bidang lainnya.

Keterlibatan pemerintah dalam olahraga dapat ditelusuri melalui pendekatan sejarah. Misalnya, di Inggris, sebagai tanah tumpah darah sebagian besar cabang olahraga modern, pada tahun-tahun perkembangan olahraga, pihak pemerintah sering kali mencampuri kegiatan olahraga. Intervensi pemerintah dirancang untuk melestarikan hak-hak istimewa terhadap olahraga tertentu, seperti berburu, melalui Undang-Undang Permainan (Game Laws). Undang-undang yang sama juga dijumpai di Perancis, yakni hingga revolusi 1789, berburu, dengan perkecualian kelinci sebagai binatang buruan, dikhususkan untuk kaum bangsawan (Holt, 1981: dalam Houlihan, 1997). Kemudian, di Inggris pada tahun 1835, Undang- Undang Kekejaman Terhadap Binatang (the Cruelty to Animal Act) lagi-lagi mencerminkan pemanfaatan kekuasaan untuk mempertahankan hak-hak istimewa kelas social yang mengecualikan banteng dan beruang, yang keduanya dianggap "olahraga" orang kota, sementara berburu musang tanpa pembatasan.

Tahap awal perkembangan olahraga, kebijakan pemerintah mencampuri olahraga untuk melindungi hak-hak istimewa kelas sosial bangsawan yang menimbulkan masalah yaitu ketimpangan dalam kesempatan berolahraga. Jika pada masa itu olahraga bersifat eksklusifa, maka sebagai kebalikannya, kini tema umum kebijakan olahraga, seperti yang diterapkan di negara-negara liberal ialah menekankan partisipasi yang merata di setiap lapisan masyarakat. Kegiatan olahraga diposisikan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Jika semula, kegiatan olahraga

dan rekreasi dilakukan sebagai konsekuensi setelah seseorang hidup sejahtera dan memiliki waktu luang, maka kini olahraga dan rekreasi itu adalah wujud dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan kondisi di Indonesia, tema ini telah diangkat sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan olahraga nasional. Deklarasi Unesco, 1978, bahwa olahraga merupakan wahana untuk menegajawantahkan hak-hak asasi manusia, sama halnya dengan isi dari Deklarasi PBB 1998 tentang Hak Anak, yakni dalam pasal 36 ditegaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh kesehatan terbaik, kesempatan mengisi waktu senggang dengan bermain dan berolahraga.

Tema kedua ialah dalam pengembangan kebijakan olahraga ialah untuk memperoleh keuntungan dari aspek kesehatan. Ketiga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menggunakan olahraga sebagai alat integrasi social. Tema keempat tertuju pada penggunaan olahraga sebagai alat untuk meningkatkan persiapan militer di suatu negara. Tema kelima adalah prestise bangsa dalam forum internasional. Pemerintah semakin sadar akan besarnya potensi olahraga, terutama olahraga kompetitif sebagai wahana untuk mengungkapkan prestasi dan prestise bangsa. Tema berikutnya ialah pemanfaatan olahraga sebagai sebuah sumber diplomatik. Peppard dan Riordan (1993; dalam Houlihan, 1997) memaparkan tema ini dengan Amerika Serikat dan Uni Sovyet sebagai dua contoh yakni pemerintah menggunakan dan memanipulasi olahraga untuk tujuan diplomatik, Kedua Negara menggunakan olahraga sebagai wahana untuk mengungkapkan persaingan ideologi, suatu cara untuk memikat negerinya pada masing-masing kubu dan sebagai cara untuk mengikat hubungan dengan sekutu-sekutunya.

Kebijakan pengembangan olahraga menunjukkan motif pemerintah terlibat dalam olahraga. Masing masing negara memiliki motif tertentu dan untuk Indonesia, tampaknya motif olahraga sebagai alat untuk persatuan dan kesatuan masih sangat relevan. Sampai akhir-akhir ini kita masih sering mendengar pernyataan para pejabat yang menempatkan olahraga sebagai wahana untuk mengungkapkan prestise bangsa Indonesia di forum internasional. Bahkan ada yang menyatakan, kini, satu-satunya kegiatan yang dapat mengangkat nama harum bangsa Indonesia ialah prestasi olahraga. Setiap negara menentukan pilihan pada satu tema atau beberapa tema sebagai focus yang dianggap tepat bagi kepentingan negara yang bersangkutan.

Prestasi Atlit

Prestasi adalah suatu bentuk penilaian mengenai kemampuan individu yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan. A. Tabrani "Prestasi adalah kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai individu dari satu kegiatan atau usaha". Dunia olahraga prestasi sangat unik karena hasil kinerja yang dicapainya serba terukur dan teramati, bahkan disajikan secara terbuka, sekaligus dipertanggung jawabkan di depan publik, disiarkan oleh media (cetak dan elektronik) dan direkam sebagai data prestasi olahraga. Olahraga modern menunjukkan karakteristik berupa struktur organisasi formal, birokrasi, sekularistik, serba terukur, dan mengejar rekor.

Karena itu di balik proses pembinaan olahraga sangat dibutuhkan pembinaan "mind set yang fleksibel" (growth mind set) lawan dari "mind set ikhtiar dan etos kerja keras, sebagai cerminan dari karakter kampiun, atau budaya akuntabilitas (culture of accountability) yang menekankan proses penyempurnaan/peningkatan secara berlanjut secara sistematis. Dorongan untuk selalu meningkatkan kinerja itu harus tumbuh dari dalam diri individu atlet, bukan karena paksaan atau tekanan dari pelatih atau pihak pembina lainnya. Berkaitan dengan sikap mental ini, sebagai contoh, para atlet di Cina sejak dini dihadapkan dengan prinsip "the three non- afraid"

meliputi "non afraid of hardship, difficulty and injury, and toughness." Dengan kata lain mereka dibiasakan untuk pertama, kerja keras, kedua, tidak takut menghadapi kesulitan dan cedera, dan ketiga bersifat tangguh.

Sebagai sebuah system, pembinaan olahraga prestasi melibatkan sejumlah komponen utama dan hasil penelitian di tingkat internasional menyikap 10 komponen utama yang disebut pilar, yaitu (1) Dukungan finansial, dukungan yang menentu dan berkelanjutan, serta jumlahnya cukup besar merupakan persyarat bagi pembinaan olahraga prestasi, (2) Organisasi dan struktur kebijakan olahraga terpadu, (3) Pemasalan dan pembibitan, merupakan pilar yang amat strategis untuk dapat dipertahankannya siklus penyediaan atlet, (4) Pembinaan prestasi: identifikasi dan pengembangan bakat, Masalah paling krusial dalam olahraga prestasi yaitu isu keberbakatan yang paling sukar diidentifikasi karena lebih terkait dengan potensi ketimbang indikator yang tampak seperti bentuk dan keterampilan fisik. (5) Pembinaan prestasi kelompok elit: sistem penghargaan dan dukungan pada masa pascakarier. Tahap paling kritis berikutnya adalah pembinaan atlet pada puncak usia berprestasi. Jumlahnya sedikit sehingga disebut elit, sekitar 5 persen dari populasi sebelumnya. Karena itu jumlahnya yang mengerucut menurut model piramid memerlukan animo atlet berbakat yang lebih banyak pada fase sebelumnya. (6) Infrastruktur olahraga: fasilitas latihan. Tidak ada kegiatan olahraga tanpa dukungan fasilitas latihan. Untuk olahraga prestasi sangat dibutuhkan fasilitas standar karena berpengaruh terhadap penguasaan teknik dan taktik. Pembangunan dan pengadaannya sebaiknya memenuhi kriteria efisiensi. (7) Penyediaan pelatih, pembinaan dan mutu training. Di antara aspek ketenagaan, seperti administrator dan wasit, maka pelatih beserta para trainer pembantu merupakan syarat mutlak bagi peningkatan prestasi. Kualitas pelatih yang tercermin dari pengetahuannya yang selalu mutakhir dan kecakapannya yang selalu meningkat merupakan tolok ukur bagi kemungkinan tercapainya prestasi. (8) Kualitas kompetisi: standar nasional dan internasional. Kegiatan kompetisi sedemikian erat kaitannya dengan kegiatan latihan karena merupakan ajang untuk meningkatkan prestasi. Karena itu sasaran pembinaan adalah meningkatkan standar mutu kompetisi, mengejar parameter nasional dan bahkan internasional. (9) Penelitian ilmiah: Input Iptek Olahraga. Fungsi Iptek olahraga adalah mencari inovasi dalam pembinaan. Jika tidak sampai ke taraf kemampuan tersebut, sekurangnya penerapan Iptek dibutuhkan untuk menyediakan informasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam pelatihan. (10) Lingkungan media dan sponsorship. Melalui media surat kabar, jika tidak ada TV atau radio, peliputan kegiatan sangat penting untuk menciptakan iklim pembinaan yang bersemangat lebih-lebih bagi kalangan atlet usia dini dan junior. Selain itu masyarakat pada umumnya sangat menyukai rubrik. Rubrik ini bermanfaat selain merupakan media penyampai pengetahuan, juga mengandung unsur pendidikan masyarakat dan sekaligus unsur hiburan.

Metode

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara tepatnya di DISPORA Karo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada

saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian kualitatif menurut Matthew dan Michael (dalam Hamid, 2007: 96) dibagi menjadi tiga langkah, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlet Karo

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 39, Koni mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, mengordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan menyiapkan, melaksanakan, dan mengordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Adapun implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi atlet Karo dilakukan dengan penyelenggaraan berbagai event olahraga terutama olahraga unggulan, yaitu olahraga individu, pembinaan, pengembangan olahraga, dan pemberian penghargaan olahraga.

Adapun hasil penulis dengan Bapak Kepala Dispora Karo, Bapak Robert Perangin-angin, S.Pd, M.Si sebagai berikut: “Di Kabupaten Karo memiliki olahraga unggulan yaitu olahraga individual seperti wushu, gulat, silat dan lain-lain, jadi kita melihat sumber apa yang dapat menambah prestasi? Olahraga-olahraga yang berprestasi inilah yang kita bina, support, kompetisi yang terarah setiap tahunnya, dulu sebelum Covid kita selalu membuat kompetisi setiap tahunnya pada olahraga-olahraga yang berpotensi mendapatkan medali terutama olahraga individual tadi”

Dalam pengembangan olahraga di Kabupaten Karo Bapak Robert menjelaskan bahwa sebelum pandemic datang, DISPORA berusaha untuk melakukan study banding kepada atlet-atlet yang berprestasi. Dengan harapan semakin meningkatnya semangat dan motivasi atlet dalam bidangnya masing-masing”.

Untuk penghargaan olahraga di Kabupaten Karo sudah dilaksanakan dengan maksimal, Walaupun penghargaan yang diberikan sangat sederhana. DISPORA Karo sangat mengapresiasi setiap prestasi yang di dapat oleh atlet Karo, untuk penghargaan yang diberikan berupa uang pembinaan atau bonus bagi atlet yang berprestasi membawa nama Kab Karo di tingkat Nasional atau pun internasional.

Untuk sarana prasarana olahraga di Kabupaten Karo sangat kurang, Bapak Robert menjelaskan bahwa “Fasilitas yang kita miliki di Kab Karo ini sangatlah minim sekali, bahkan GOR pun kita tidak punya, kita hanya memiliki lapangan sepak bola dan jalur jalan sehat, tapi dengan minimnya sarana prasarana di Karo ini tidak membuat atlet-atlet kita menyerah begitu saja. Malah semakin bersemangat membuktikan bahwa atlet Karo bisa walaupun dengan sarana prasarana yang minim.”

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Karo" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Karo belum dapat dikatakan maksimal karena masih terkendala beberapa hal seperti sarana prasarana dan pendanaan. Walaupun demikian tidak menyurutkan tekad dari atlet Karo dalam meraih prestasi.

Daftar Pustaka

- Bosscher, Veerle De.Simon Shibli. Bottenburg, H. W. . M. van. (2015). *SUCCESSFUL ELITE SPORT POLICIES*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.).
- Glenniza, D. (n.d.). *Strategi Kebijakan Olahraga yang Membawa Kesuksesan*.
<https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d-3055123/strategi-kebijakan-olahraga-yang-membawa-kesuksesan>
- Lutan, R. (2013). *pedoman perencanaan pembinaan olahraga* (A. Mahendra (ed.); 1st ed.).
- Nababan, M. B. R. D. I. A. (2018). *Rekreasi Di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017*. 04.
- Scheerder, Jeroen . Annick Willem, E. C., & Editors. (n.d.). *Sport Policy Systems and Sport Federations*.
- Undang-Undang No 3 tahun 2005, *Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas dan Hukum, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI